

ISSN 0854-3461



MUDRA

JURNAL SENI BUDAYA
VOLUME 27 NO. 1 JANUARI 2012



INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
UPT. PENERBITAN

MUDRA

JURNAL SENI BUDAYA

Jurnal Seni Budaya Mudra merangkum berbagai topik kesenian, baik yang menyangkut konsepsi, gagasan, fenomena maupun kajian. Mudra memang diniatkan sebagai penyebar informasi seni budaya sebab itu dari jurnal ini kita memperoleh dan memetik banyak hal tentang kesenian dan permasalahannya.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Persyaratan seperti yang tercantum pada halaman belakang (Petunjuk untuk Penulis). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Terakreditasi dengan Peringkat B dari 1 November 2010 sampai 1 November 2013 (Akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan), berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010, tanggal 1 November 2010.

Ketua Penyunting

I Wayan Rai S.

Wakil Ketua Penyunting

I Wayan Setem

Penyunting Pelaksana

I Wayan Setem

Rinto Widyarto

I Gusti Ngurah Seramasara

Diah Kustiyanti

Ni Made Ruastiti

Ni Luh Sustiawati

I Made Artayasa

I Gede Agus Jaya Sadguna

Penyunting Ahli

I Wayan Rai S. (ISI Denpasar) *Ethnomusicologist*

Margaret J. Kartomi. (Monash University) *Ethnomusicologist*

Michael Tenzer. (UMBC) *Ethnomusicologist*

Jean Couteau. (Sarbone Francis) *Sociologist of Art*

Ron Jenkins. (Wesleyan University) *Theatre*

I Putu Gede Sudana (Universitas Udayana Denpasar) *Linguistics*

Tata Usaha dan Administrasi

Ni Luh Ayu Cempaka Dewi

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:

UPT. Penerbitan ISI Denpasar, Jalan Nusa Indah Denpasar 80235, Telepon (0361) 227316, Fax. (0361) 236100

E-Mail: jurnalmudra@isidos.ac.id atau chempaka_1308@yahoo.com. Hp. 081337488267 dan 08179771717.

Diterbitkan

UPT. Penerbitan Institut Seni Indonesia Denpasar. Terbit pertama kali pada tahun 1990. Dari diterbitkan sampai saat ini sudah 5 (lima) kali berturut-turut mendapat legalitas akreditasi dari Dikti, 1998-2001 (C), 2001-2004 (C), 2004-2007 (C), 2007-2010 (B), 2010-2013 (B).

Dicetak di Percetakan

PT. Percetakan Bali, Jl. Gajah Mada I/1 Denpasar 80112, Telp. (0361) 234723, 235221. NPWP: 01.126.360.5-904.000, Tanggal pengukuhan DKP: 01 Juli 2006.

Mengutip ringkasan dan pernyataan atau mencetak ulang gambar atau label dari jurnal ini harus mendapat izin langsung dari penulis. Produksi ulang dalam bentuk kumpulan cetakan ulang atau untuk kepentingan periklanan atau promosi atau publikasi ulang dalam bentuk apa pun harus seizin salah satu penulis dan mendapat lisensi dari penerbit. Jurnal ini diedarkan sebagai tukaran untuk perguruan tinggi, lembaga penelitian dan perpustakaan di dalam dan luar negeri. Hanya iklan menyangkut sains dan produk yang berhubungan dengannya yang dapat dimuat pada jurnal ini.

Permission to quote excerpts and statements or reprint any figures or tables in this journal should be obtained directly from the authors. Reproduction in a reprint collection or for advertising or promotional purposes or republication in any form requires permission of one of the authors and a licence from the publisher. This journal is distributed for national and regional higher institution, institutional research and libraries. Only advertisements of scientific or related products will be allowed space in this journal.

MUDRA

JURNAL SENI BUDAYA

1. Estetika dan Religius Geguritan Sucita I Wayan Sukayasa	1
2. Eksistensi Seni Pertunjukan Rakyat di Daerah Kedu Jawa Tengah Nanik Sri Prihatini	8
3. Kajian Bentuk dan Nilai Budaya Permainan Rakyat Bali di Kabupaten Badung Ni Luh Sustiwati	22
4. Perkembangan Tradisi, Seni dan Budaya Daerah Sebagai Pendukung Kebudayaan Nasional I Wayan Gede Suacana	31
5. Melacak Pengaruh Konsep, Sistem, dan Elemen Musik Konvensional Barat dalam Genre-Genre Musik Minahasa di Era Kolonial Barat Perry Rumengan	38
6. Pemertahanan Tradisi <i>Ruwatan</i> dalam Era Modernisasi dalam Masyarakat Jawa di Desa Kemendung, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur Relin D.E.	45
7. Kajian Kearifan Lokal Suku Bajo di Desa Bungin Permai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Mursidin T.	53
8. Hegemoni Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Dewa Putu Oka Prasiasa	62
9. Sosiologi Seni Untuk Menganalisis Desain Kursi dalam Konteks Budaya Jawa Eddy Supriyatna	78
10. Karakter dan Intensitas “Warnabali” Konsep Warna dan Maknanya A. A. Gede Rai Remawa, I Nyoman Wiwana, I Wayan Sukarya dan A. A. Bawa Putra	89
11. Metamor Kuda dan Fenomena Perempuan dalam Ruang Imajinasi I Made Sumantra	101



Hegemoni Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata

DEWA PUTU OKA PRASIASA

Jurusan Manajemen Perjalanan Wisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta, Indonesia
E-mail: oka.dewaputu@yahoo.com

Penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan penelitian pengembangan pariwisata dan partisipasi masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih di. Pertama, bagaimana pengembangan pariwisata di desa wisata, kedua, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di desa wisata, ketiga, apa efek dan makna pembangunan pariwisata dan partisipasi masyarakat di desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengembangan pariwisata dan partisipasi masyarakat untuk produk pariwisata sebagai desa wisata. Metodologis, ini perspektif penelitian studi budaya, dengan menerapkan metode kualitatif dan teori hegemoni juga diterapkan. Pariwisata pembangunan di desa wisata disebabkan oleh diversifikasi produk wisata, menyebabkan co-modifikasi bangunan tradisional saka roras sebagai akibat dari konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah dan badan pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di desa wisata melalui lima tahap, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasional, tahap pengembangan dan tahap pengawasan. Pariwisata pembangunan dan partisipasi masyarakat di desa wisata memiliki efek untuk manajemen panorama desa wisata, yang diambil oleh wisatawan, pekerjaan pekerja dari masyarakat setempat, kekerasan trihita karena (parhyangan, pawongan dan palemahan). Pariwisata pembangunan dan partisipasi masyarakat yang berarti penyebab kesejahteraan, pelestarian arti dan makna penegakan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, pengembangan pariwisata bersinergi kebutuhan desa wisata antara pemegang saham dan setiap program dalam pembangunan ini terus orientasi kepada masyarakat lokal untuk menjamin keberlanjutan sosial-budaya, sosial-ekonomi dan lingkungan.

Hegemony of Tourism Development and People's Involvement at a Tourist Village

This study is focused on three problems related to the development of tourism and the people's participation at *Jatiluwih* as a Tourist Destination. The first problem is what the development of tourism at *Jatiluwih* as a tourist destination was like; the second problem is what the people's participation in the tourism development at *Jatiluwih* as a tourist village was like; and the third problem is what were the impact and meaning of the tourism development and the people's participation at *Jatiluwih* as a tourist destination. This study aims at understanding and analyzing the tourism development and the people's participation at *Jatiluwih* as a village used a tourist product. Methodologically, this is a cultural study, in which qualitative method and the theory of hegemony were used. The development of tourism in rural areas such as *Jatiluwih* needed diversification of products. Such a diversification led to the co-modification of the 12-pillared traditional building and conflicts of interests among the people, the government, and the tourism boards. The people's participation in developing tourism at *Jatiluwih* as a tourist village was done through five stages; preparation, planning, implementation, development and supervision. The local people, as the workers, should manage the views enjoyed by tourists. In addition, they should also maintain *Trihitakarana* (the relation between God and humans; the relation among humans; and the relation between humans and their environment). The development of tourism and the people's participation could improve welfare and could mean legal empowerment. Based on what was described above, the stakeholders should be synergized in the development of tourism; every program should be oriented towards the local people to sustain socio-culture, socio-economy and environment.

Keywords: hegemony, society participation, tourism village, *trihita karana*

Hegemoni memetakan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Bali merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Utama di Indonesia dan bahkan di dunia karena memiliki berbagai aset wisata dan telah banyak menarik perhatian wisatawan. Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, Pemerintah Daerah Bali bersama-sama masyarakat, di samping melakukan tindakan menjaga keamanan yang merupakan investasi bagi industri pariwisata, juga meningkatkan sadar wisata masyarakat setempat dan melakukan diversifikasi produk wisata. Diversifikasi produk wisata yang dilakukan pada intinya mengacu pada potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh daerah Bali dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai inti dalam pengembangan pariwisata. Dalam kerangka *cultural studies* (Mowforth dan Munt, 1998: 53) pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat setempat merupakan suatu reaksi terhadap kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh modernisasi Dunia Pertama terhadap Dunia Ketiga. Oleh karena itulah, kajian ini difokuskan pada hegemoni terhadap keterlibatan masyarakat yang dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan, dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan pariwisata, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dan menginterpretasi dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di desa wisata.

Pada pengembangan pariwisata, selain di dominasi oleh diskursus tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan, yang tidak kalah populernya adalah diskursus tentang pariwisata berbasis masyarakat. Harapan masyarakat adalah dengan implementasi diskursus ini mereka dapat terlibat dalam seluruh aspek pengembangan pariwisata di desanya. Namun implementasi diskursus ini di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan tidak berjalan dan bahkan menyuburkan sistem *top-down* dan sentralistik. Pendekatan pembangunan dengan sistem *top-down* dan sentralistik ini sangat kental terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru hingga Orde Reformasi sekarang ini, yaitu banyak membatasi ide-ide yang ada di dalam masyarakat khususnya yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Sebagai akibatnya, sebagian besar masyarakat di desa setempat belum merasakan manfaat pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. Bahkan, yang terjadi adalah keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di desanya sangat terbatas sehingga timbul konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan yang mendukung pengusaha pariwisata yang kapitalistik, timbul perlawanan dan kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni. Berdasarkan kesejangan antara harapan dan kenyataan itulah, maka penelitian ini menfokuskan mengkaji masalah a) bagaimanakah pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan?, b) bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan?, c) apa dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan?.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan analisis deskriptif-kualitatif, sedangkan paradigmanya adalah interpretivisme (postpositivisme) yang bertujuan memahami fenomena sosial. Adapun informan penelitian ini adalah anggota masyarakat Desa Jatiluwih yang terdiri atas anggota *sekaa-sekaa*, mantan *bendesa adat*, *pemangku*, petani, pegawai (PNS, pegawai swasta, dan ABRI), aparat Desa Jatiluwih, pengurus *Desa Adat* Jatiluwih dan *Desa Adat* Gunungsari, aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan, dan aparat Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi berperan serta ini dilakukan terhadap aktivitas penduduk yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat, baik berupa aktivitas rutin, insidental, formal, maupun nonformal, termasuk ikut dalam pertemuan-pertemuan (berupa rapat dan penyuluhan) yang diselenggarakan di desa setempat. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* untuk mewawancarai masyarakat. Selanjutnya, untuk mewawancarai pengurus *desa adat*, pengurus desa dinas, serta *sekaa-sekaa* yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, yakni dilakukan wawancara secara terbuka. Teknik analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif dan interpretatif dengan mempergunakan teori hegemoni Gramsci.

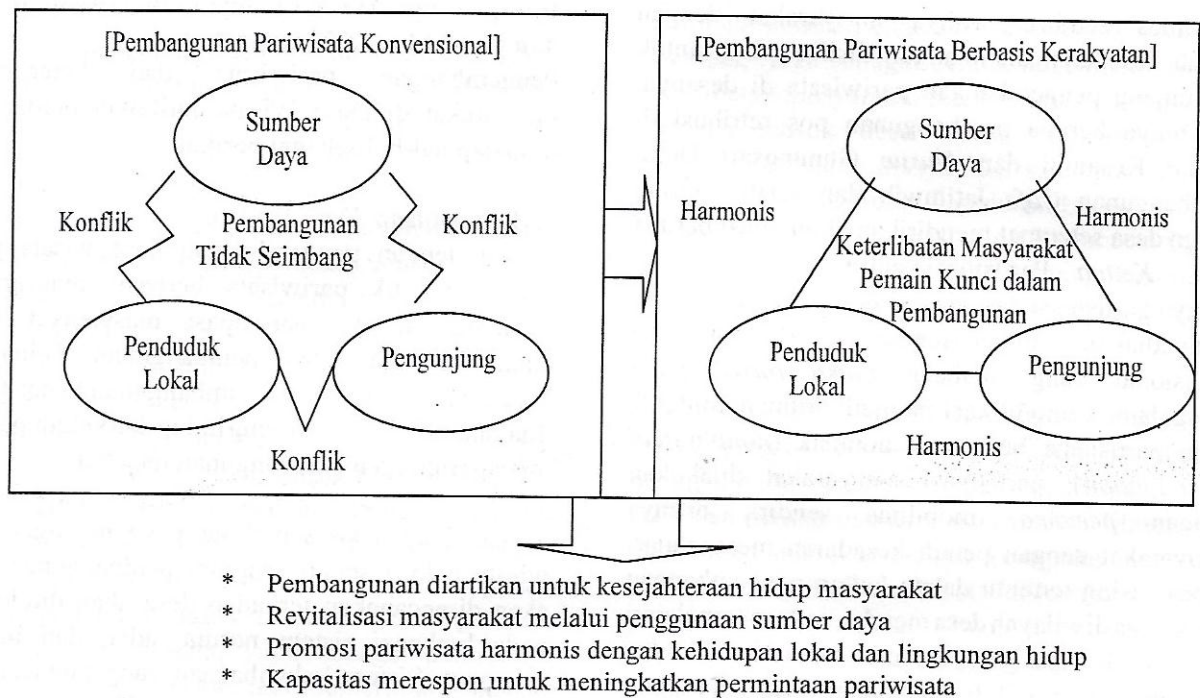
Terdapat dua penelitian terdahulu yang dapat dikemukakan terkait desa wisata. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terlihat dari pendekatan penelitian, subjek penelitian, dan masalah yang dibahas. Pendekatan penelitian terdahulu adalah paradigma budaya dan sosiologis, sedangkan penelitian ini pendekatannya adalah kajian budaya (*cultural studies*) dengan pembahasan secara multidisipliner dan interdisipliner. Subjek penelitian terdahulu adalah masyarakat *desa adat*, sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya di samping masyarakat *desa adat* juga masyarakat desa dinas. Dilihat dari permasalahannya, penelitian terdahulu membahas permasalahan yang terkait pemberdayaan masyarakat dan hal-hal yang bersifat umum seperti tata ruang serta dominasi dalam operasionalisasi desa wisata, sedangkan penelitian ini membahas permasalahan pengembangan pariwisata di desa wisata, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di desa wisata, serta dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di desa wisata. Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh gambaran kedua penelitian terdahulu terkait desa wisata seperti Tabel 1.

Selain dua penelitian di atas, terdapat juga satu penelitian yang dijadikan rujukan, yaitu penelitian pariwisata di Bali untuk penerapan pariwisata berbasis komunitas dan pariwisata Bali yang memiliki kearifan lokal oleh Bagus (2002a; 2002b; dan 2002c) serta penelitian Ardika (2003). Penelitian ini mengemukakan bahwa pariwisata Bali diarahkan pada upaya penyelamatan lingkungan hidup, penghargaan terhadap konsep preservasi, penghargaan terhadap konsep konservasi, dan penghargaan pada masyarakat serta budaya lokal.

Selain penelitian di atas, Natori (2001) membedakan pembangunan pariwisata konvensional dengan pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan sebagai berikut. Pada model pembangunan pariwisata konvensional, interaksi antara sumber daya, penduduk, dan pengunjung tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. Selanjutnya, pada model pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan, sumber daya, penduduk lokal, dan pengunjung berinteraksi secara harmonis, di samping menjadikan masyarakat sebagai pemain kunci dalam pembangunan pariwisata.

Tabel 1. Penelusuran Terhadap Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Pendekatan	Substansi
Arka (1999)	Paradigma Budaya	Permasalahan yang dibahas adalah latar belakang Desa Adat Penglipuran dikembangkan menjadi desa wisata terpadu, upaya pemberdayaan desa adat dalam pengembangan desa wisata terpadu, dan makna pemberdayaan bagi masyarakat Desa Adat Penglipuran. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Adat Penglipuran.
Pitana (1999)	Sosiologis	Membahas hal-hal yang bersifat umum seperti penataan ruang, pembuatan tempat parkir, serta dominasi desa dinas terhadap desa adat dalam operasional Desa Wisata Jatiluwih.



Gambar 1. Konsep dan arti penting pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan.

PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA JATILUWIH

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih menimbulkan komodifikasi pada bangunan tradisional *saka roras*, dan semakin meningkatnya penjualan tanah di sekitar pura dan penjualan tanah di hutan sebelah utara Pura Luhur Petali. Penjualan tanah tersebut terus berlanjut seiring pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Penjualan tanah di sekitar pura terkait dengan sosio-religius, kultural, dan ekonomi masyarakat setempat, serta dari sisi *bhisama* kesucian pura merupakan pelecehan *trihita karana* (*parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*), adat, dan agama. Sedangkan komodifikasi terhadap bangunan tradisional *sakaroras* pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih terjadi sebagai akibat konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha pariwisata. Namun, dalam masyarakat, akibat konflik yang timbul, terjadi perpecahan sehingga masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih yang berwujud partisipasi dapat dilihat pada lima tahap.

1. Tahap Persiapan.

Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk menyongsong kehadiran pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

2. Tahap Perencanaan.

Tahap ini terdiri atas identifikasi kebutuhan dan analisis kemampuan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat fungsional, artinya masyarakat setempat berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh tenaga ahli yang berasal dari luar desa setempat yang diberi kepercayaan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

3. Tahap Operasional.

Tahap ini terdiri atas partisipasi berbentuk fisik dan partisipasi berbentuk nonfisik. Pada partisipasi berbentuk fisik (*physical participation*), partisipasi masyarakat setempat dilakukan dengan *pertama*,

mobilitas sendiri, artinya masyarakat dengan penuh kesadaran membangun fasilitas fisik untuk menunjang pengembangan pariwisata di desanya. Wujudnya berupa pembangunan pos retribusi di *Dusun Kesambi* dan *Dusun Gunungsari* Desa, pembangunan *Cafe* Jatiluwih dan salah seorang warga desa setempat mendirikan akomodasi berupa *Inn*. *Kedua*, Partisipasi untuk bahan insentif, artinya partisipasi dari masyarakat setempat dengan menyediakan sumber-sumber seperti bangunan tradisional tiang duabelas (*saka roras*) yang mengalami komodifikasi menjadi "rumah contoh". Pada partisipasi berbentuk nonfisik (*nonphysical participation*), partisipasi masyarakat dilakukan dengan *pertama*, mobilitas sendiri, artinya masyarakat dengan penuh kesadaran mempelajari bahasa asing tertentu dalam kaitan pengembangan pariwisata di wilayah desa mereka, serta mempelajari kesenian berupa gamelan dan tari-tarian. *Kedua* partisipasi interaktif, berupa pengiriman lima orang pemuda setempat untuk belajar perhotelan dan pariwisata pada lembaga pendidikan formal.

4. Tahap Pengembangan.

Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat spontan antara lain dengan mendirikan dan mengelola usaha-usaha yang terkait dengan kepariwisataan, seperti: pengelolaan usaha penginapan, usaha cuci pakaian, usaha kerajinan perak, usaha warung makanan dan minuman, serta usaha yang menjual kebutuhan sehari-hari.

5. Tahap Pengawasan.

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat lebih kepada pengawasan yang bersifat praktis dan preventif, untuk mencegah agar desanya sebagai daya tarik wisata tidak tercemar oleh tindakan-tindakan negatif. Secara umum partisipasi masyarakat pada tahap ini bersifat manipulatif. Partisipasi yang bersifat manipulatif dari masyarakat terjadi, di samping karena program-program yang dibuat untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Jatiluwih tidak sepenuhnya berjalan, juga karena masyarakat setempat tidak memiliki kekuasaan (*power*) untuk mengatur dan mengawasi sendiri pengembangan desanya sebagai desa wisata. Dengan demikian, penguatan dan revitalisasi desa dari pengembangan pariwisata berupa desa wisata tidak dapat berjalan.

Dampak dan Makna Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat

Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih berdampak terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Pengelolaan Desa Wisata

Sesuai dengan pengembangan desa wisata yang berkarakteristik pariwisata berbasis masyarakat, menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahap pembangunan. Tujuannya adalah agar pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan tersebut.

Sesuai dengan konsep dasar pengembangan desa wisata bahwa setiap program pembangunan yang akan direncanakan terhadap desa akan ditolokkan pada berbagai sistem norma, adat, dan budaya setempat. Sistem kelembagaan yang direncanakan menyandang program-program yang akan diusahakan semaksimalnya untuk menggunakan kelembagaan lokal yang sudah ada.

Berangkat dari konsep dasar pengembangan tersebut, pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dilihat dari kelembagaan yang ada, khususnya dari struktur organisasi pengelola yang berbentuk *steering committee*, masih mencerminkan struktur pengelolaan yang tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat. Dalam struktur organisasi tersebut masih dijumpai unsur-unsur pemerintah, baik sebagai pelindung maupun sebagai pembina.

Masuknya unsur pemerintah dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, dapat memperkuat kekuasaan yang dimilikinya dan dengan diskursus pengetahuan dapat menyebabkan terhegemoninya keterlibatan masyarakat pada pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih. Diskursus yang dipergunakan untuk menghegemoni adalah yang melemahkan masyarakat, seperti masyarakat tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan desa wisata, dan masyarakat tidak memiliki keahlian sebagai pengelola. Hal ini menurut Foucault (2003: 132) merupakan suatu bentuk praktik-praktik kekuasaan yang terkait dengan posisi-posisi yang strategis. Posisi strategis itu adalah sebagai pengelola Desa Wisata Jatiluwih.

Masuknya unsur pemerintahan dalam struktur organisasi pengelola Desa Wisata Jatiluwih, yakni merupakan suatu cara atau teknik yang dikembangkan oleh pemerintah untuk tetap ikut dalam pengelolaan pembangunan pariwisata. Padahal, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratcharak (2007: 159) di Phuket Thailand, pemerintah setempat sudah tidak ikut mengatur dalam pembangunan pariwisata. Pengaturan diserahkan kepada masyarakat setempat (dapat bekerja sama dengan *partner*) baik pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, implementasi, maupun pengawasan. Masuknya unsur pemerintahan dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, menurut Foucault (dalam Lubis, 2006: 165) merupakan "strategi" pemilik kekuasaan untuk berlindung di balik regulasi. Dalam hal ini, pemilik kekuasaan menjadikan regulasi sebagai pembenar masuk dalam struktur organisasi pengelola desa wisata, yaitu sebagai pelindung. Masuknya pemilik kekuasaan (pemerintah) sebagai pengelola tidak lain bertujuan untuk menghegemoni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih.

Sesuai dengan roh konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, seharusnya masyarakat (*desa adat* dan *subak*) diberikan kekuasaan penuh atas seluruh pengelolaan yang ada di Desa Wisata Jatiluwih. Pemerintah dan pelaku pariwisata hanya bertindak sebagai mitra kerja. Untuk itu, ke depan, struktur organisasi tersebut perlu didekonstruksi. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat benar-benar seluruhnya terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, sehingga Desa Wisata Jatiluwih pengelolaannya benar-benar berpusat pada masyarakat setempat. Hal ini diperkuat oleh Pujaastawa (2005: 142) bahwa apabila kondisi *subak* dan *desa adat* sudah mapan, maka peran pemerintah dan pelaku pariwisata dapat dikurangi dan bahkan mungkin tidak dilibatkan lagi.

Selain dilihat dari sisi pengelolaan desa wisata, masuknya unsur pemerintah pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, juga berdampak terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih. Hal ini dimaksudkan sebagai masuknya unsur pemerintah (dalam hal ini yang ditunjuk adalah Kepala Desa Jatiluwih) sebagai pengelola retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih. Masuknya kepala desa sebagai pengelola retribusi masuk, di samping sebagai

cerminan ketidakpercayaan terhadap masyarakat setempat, juga sebagai bentuk hegemoni terhadap keterlibatan masyarakat setempat pada pengelolaan retribusi masuk desa wisata. Hegemoni yang dilakukan terhadap masyarakat setempat ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kepala Desa Jatiluwih sebagai Pengelola Retribusi Masuk Desa Wisata Jatiluwih.

Keluarnya dua Surat Keputusan Bupati di atas, menurut Barker (2005: 81) merupakan penggambaran terjadinya perang posisi pemerintah melawan perang manuver masyarakat. Masyarakat melakukan manuver berupa keinginan mengelola retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih, sedangkan pemerintah berkemauan juga untuk mengelola retribusi masuk tersebut karena sudah berjasa dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Dengan adanya keinginan yang sama dari kedua belah pihak, menyebabkan terjadinya perang posisi.

Dengan keluarnya kedua Surat Keputusan Bupati Tabanan tersebut, yakni membuat inisiatif dan kreativitas masyarakat terpasung dalam mengelola retribusi masuk. Dengan demikian, secara tidak langsung aspirasi masyarakat juga terhambat. Kondisi ini mengembalikan model pengelolaan dari berbasis masyarakat (*bottom-up*) ke model pengelolaan dengan budaya lama (*top-down*) sehingga masyarakat selalu tergantung kepada pemerintah dalam bidang pariwisata. Hal ini berarti kekuasaan berupaya menghasilkan sesuatu yang baru dalam rangka melanggengkan ketergantungan setiap orang padanya. Berkaitan dengan hal ini, Foucault (dalam Piliang, 2005: 111-114) menegaskan bahwa pelanggengan terhadap kekuasaan yang paling efektif adalah dengan cara memberi ruang hidup atau ruang gerak seluas-luasnya bagi pelepasan berbagai bentuk hasrat di dalam kekuasaan itu sendiri. Dalam hal ini, hasrat kekuasaan itu berupa keinginan untuk berkuasa pada pengelolaan retribusi masuk Desa Wisata Jatiluwih.

Dalam rangka pengembangan ke depan, batasan keterlibatan masyarakat perlu mendapat ketegasan dari semua *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan retribusi masuk, yakni dengan tujuan agar masyarakat setempat benar-benar terlibat sepenuhnya dalam pengelolaan retribusi masuk

tersebut. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam masyarakat, khususnya pada pengelolaan retribusi masuk dapat dipenuhi dengan memberikan bimbingan serta pelatihan.

Posisi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk dapat bersifat koordinasi, artinya dengan model seperti ini akan meniadakan pemikiran tentang dominasi dari kedua belah pihak. Dengan posisi seperti ini, dapat menimbulkan interaksi yang bersifat terbuka antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk, di samping berpeluang timbulnya berbagai inovasi dalam menjawab tantangan pengelolaan pengembangan pariwisata, khususnya terkait dengan retribusi masuk desa wisata. Terkait dengan tantangan pengembangan pariwisata, khususnya dalam pengelolaan retribusi masuk ke daya tarik wisata, penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bali (2008: 86) merekomendasikan penerapan sistem pungutan retribusi satu pintu masuk Bali, melalui pembentukan perusahaan daerah, penyusunan peraturan daerah, dan merancang sistem dan prosedur pungutan retribusi satu pintu.

Hasil penelitian Bappeda Provinsi Bali di atas jika dikaitkan dengan sistem pemungutan retribusi yang telah dilakukan di Desa Wisata Jatiluwih, memiliki beberapa kesamaan dalam hal dampak yang akan ditimbulkan. Dampak tersebut sebagai berikut. *Pertama*, timbul rasa ketidakadilan. Hal ini akan timbul manakala hasil dari pemungutan retribusi masuk satu pintu ke Bali tersebut tidak secara merata terdistribusi kepada kabupaten/kota yang ada di Bali. Sedangkan untuk Desa Wisata Jatiluwih, rasa ketidakadilan tersebut muncul sebagai akibat tidak meratanya pembagian hasil retribusi masuk daya tarik wisata antara *Desa Adat* Jatiluwih dengan *Desa Adat* Gunungsari. *Kedua*, timbul pungutan liar pada daya tarik wisata yang bersifat *public good*. Kondisi ini terjadi karena masyarakat sekitar tempat daya tarik wisata yang bersifat *public good* (seperti pemandangan alam) tersebut ingin mendapatkan hasil dari daya tarik wisata yang ada di sekitar mereka. Untuk mencapai keinginan tersebut, dilakukan pungutan liar terhadap wisatawan yang kebetulan menikmati daya tarik wisata *public good* tersebut. Terkait dengan Desa Wisata Jatiluwih, pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat berupa

"biaya *shooting*" atau biaya pengambilan gambar, selain disebabkan oleh keinginan mendapatkan hasil dari pemandangan yang disajikan oleh terasering sawah, juga sebagai akibat dangkalnya pemahaman masyarakat setempat terhadap implementasi pariwisata berbasis masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

2. Pengambilan Gambar oleh Wisatawan

Pada beberapa daerah ada kecenderungan bahwa pengembangan pariwisata selalu dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Sebagai dampaknya timbul usaha-usaha untuk mengkomodifikasikan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dikomodifikasi, seperti keramahtamahan dan keindahan alam dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari pengembangan pariwisata yang dilakukan.

Pada musim-musim kehadiran wisatawan ke suatu daya tarik wisata, sering kali hubungan antara wisatawan dengan penduduk yang menerima kehadiran mereka merupakan hubungan yang bersifat komodifikasi. Akibatnya, ada hal-hal yang termasuk unik (*curiosity*) dan daya tarik sosial (*social interest*) dibuat sedemikian rupa sehingga setiap wisatawan yang hendak menyaksikan sesuatu harus dengan imbalan yang setimpal. Kejadian seperti ini sering terjadi di beberapa destinasi pariwisata dan daya tarik wisata. Untuk di Bali, yang pernah terjadi adalah kalau wisatawan membidikkan kamera pada seseorang, maka secara spontan orang tersebut menengadahkan tangannya dengan mengatakan, "*One dollar, sir!*". Hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang pariwisatanya sudah berkembang.

Sementara itu, untuk daerah-daerah yang pariwisatanya belum berkembang, kalau ada wisatawan yang membawa kamera ke daerah-daerah terpencil dan bertemu penduduk setempat, maka secara otomatis penduduk setempat akan membuat barisan dan mereka meminta untuk di foto. Setelah di foto mereka tidak akan meminta bayaran, tetapi mengucapkan terima kasih.

Fenomena tentang "*One dollar, sir!*" di atas juga terjadi di Desa Wisata Jatiluwih, tetapi dengan objek yang berbeda. Jika ada wisatawan yang memotret terasering sawah dengan latar belakang keindahan alamnya, maka wisatawan tersebut akan didatangi oleh warga yang melihat aktivitas mereka untuk

dimintai uang, yang mereka sebut sebagai "biaya *shotting*". Hal ini berarti masyarakat desa setempat sudah melakukan komodifikasi terhadap keindahan alam. Sehubungan dengan hal ini Barker (2004: 408) mengemukakan bahwa komodifikasi sebagai sebuah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme sehingga objek, kualitas, dan tanda dijadikan sebagai komoditas. Dalam hal ini komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar.

Jika dikaitkan dengan proses yang dilalui oleh komodifikasi, dari proses produksi, konsumsi, dan distribusi, maka pada saat pengambilan gambar terasering sawah dengan latar belakang keindahan alam, sebenarnya sudah terjadi proses produksi sekaligus konsumsi. Pemandangan dan keindahan alam sebagai komoditas pada saat itu hanya dinikmati oleh wisatawan tersebut. Tetapi jika komoditas tersebut diproduksi secara massal, misalnya sebagai *postcard*, maka pada proses inilah terjadi keterlibatan kapitalisme, yang menurut Turner (1992: 115-138) tujuannya adalah ekonomi uang yang didasarkan atas semangat menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pada kondisi seperti ini kapitalis akan memproduksi *postcard* dalam bentuk massal (*mass product*).

Adanya kejadian seperti ini sempat meresahkan para pelaku pariwisata yang secara kebetulan mengemas Desa Wisata Jatiluwih dalam paket wisata mereka. Hal ini berdampak pada citra (*image*) kepariwisataan Desa Wisata Jatiluwih pada khususnya dan Bali pada umumnya.

Dari sisi masyarakat setempat, komodifikasi terjadi karena adanya interpretasi yang salah terhadap pariwisata berbasis masyarakat pada pengembangan desa wisata di desa setempat. Masyarakat terlalu kebablasan dalam mengartikan pengembangan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Menurut masyarakat setempat, apa pun boleh dilakukan sepanjang untuk masyarakat setempat. Hal ini tentulah suatu interpretasi yang kurang tepat. Untuk mengatasinya, perlu konsensus di antara *stakeholders* yang terlibat, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, serta penataran terhadap masyarakat terkait dengan tingkah laku dan kesenangan wisatawan selama berada di daya tarik wisata. Hasil pendidikan, pelatihan dan penataran tersebut dapat dijadikan kebijakan pengembangan

pariwisata yang sedang dan akan dilaksanakan di Desa Wisata Jatiluwih.

3. Penyerapan Pekerja dari Masyarakat Setempat Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih pada aras praktis berdampak terhadap terserapnya masyarakat setempat sebagai pekerja pada usaha pariwisata. Masyarakat desa setempat yang terserap bekerja pada usaha pariwisata, bekerja secara langsung pada usaha restoran dan penginapan. Secara tidak langsung masyarakat setempat bekerja sebagai pemasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha pariwisata tersebut. Jumlah masyarakat setempat yang bekerja secara langsung pada usaha pariwisata sangat kecil. Sebagian besar kesempatan kerja langsung yang ada diisi oleh pekerja pendatang, baik dari luar Desa Wisata Jatiluwih maupun dari luar Bali.

Penggunaan pekerja pendatang merupakan sebuah konsekuensi dari pengembangan pariwisata, yang seakan-akan secara langsung dan tidak langsung pariwisata mengundang pekerja-pekerja dari luar. Hal ini menurut Pitana (2003: 131) berasosiasi dengan proses indigenisasi masyarakat Bali dan meningkatkan in-migrasi dari luar pulau. Selanjutnya, jika dilihat dari konsep "kemerekaan" dan "kekitaan" atau *keliyanaan*, Bali dengan destinasi-destinasi pariwisatanya dituntut untuk tidak saja menjadi "kota plural", tetapi terutama sebagai "kota multikultural", tempat bertemu dan silang-menyilangnya manusia dari berbagai suku, ras, agama, bangsa, profesi, seks, serta objek, yang menunjukkan hubungan interteks lintas budaya, antar-budaya, multikultural, dan subkultural yang kompleks (Piliang, 2004: 474-475).

Penyerapan pekerja yang sangat kecil dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, selain disebabkan oleh kecilnya kesempatan yang diberikan oleh pemilik atau pengontrak usaha pariwisata di desa setempat, juga disebabkan oleh pengaruh internal masyarakat setempat. Generasi muda dari Desa Wisata Jatiluwih lebih tertarik bekerja di luar desa mereka. Hal ini karena besarnya faktor penarik yang berasal dari luar desa mereka, khususnya dari daya tarik wisata yang sudah maju dan terkenal yang ada di Bali, seperti: Tanah Lot, Kuta, Nusa Dua, Sanur, Candidasa, dan Lovina serta daya tarik bekerja ke kapal pesiar. Dengan kuatnya daya tarik

yang berasal dari destinasi pariwisata yang sudah maju dan berkembang itu, membuat para pekerja yang memiliki keahlian dan kemampuan, yakni lebih banyak terserap bekerja ke luar desa setempat atau ke daya tarik wisata yang sudah maju dan terkenal di atas.

Larinya generasi muda desa setempat untuk bekerja ke daya tarik wisata yang sudah maju dan terkenal di perkotaan, menurut Giddens (dalam Abdullah, 2006: 38) merupakan *emancipatory politics* dan *life politics*. Sebagai *emancipatory politics*, konsumsi perkotaan membebaskan manusia dari hambatan-hambatan posisi sosial tradisional. Selanjutnya, sebagai *life politics*, konsumsi perkotaan yang dilakukan oleh generasi muda Desa Wisata Jatiluwih merupakan politik aktualisasi diri dalam lingkungan yang terorganisasi secara reflektif, dalam hal ini refleksivitas menghubungkan diri dan tumbuh ke dalam sistem global.

Masyarakat yang terserap bekerja pada usaha pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, meskipun jumlahnya masih sangat kecil, telah merasakan adanya peningkatan pendapatan dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya yang mereka tekuni. Peningkatan pendapat ini juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka, baik dilihat dari sisi *artha*, *dharma*, dan *kama*.

Dalam kerangka meningkatkan kualitas pengembangan pariwisata, lebih tertariknya pemuda setempat bekerja di luar desa mereka merupakan bentuk pengingkaran terhadap pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), di samping juga merupakan penarik datangnya pekerja pendatang dari luar Desa Wisata Jatiluwih. Untuk itu, perlu ditanamkan sedini mungkin kepada para calon tenaga kerja dari desa setempat tentang kearifan lokal *jele melah gelahang*, artinya hasil apa pun yang terjadi pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, sepatutnya masyarakat setempat yang memenuhi kualifikasi tetap menjadi pemain inti di antara pekerja yang bekerja pada usaha pariwisata yang ada di desa tersebut.

Dalam konteks pergeseran tempat, berpindahnya sebagian generasi muda Desa Wisata Jatiluwih bekerja ke kota, menurut Appadurai (dalam

Abdullah, 2006: 38) telah menghilangkan batas-batas kebudayaan karena kota memiliki *landscape* dan *ethnoscape* yang berbeda dengan desa. Dalam kondisi seperti ini, menurut Anderson dan Friedman (dalam Abdullah, 2006:38) yang patut dipertanyakan kepada generasi muda tersebut adalah masalah identitas ke-lokal-an mereka. Identitas ke-lokal-an yang dipertanyakan, tidak saja menyangkut gaya hidup mereka setelah bergaul dan mengonsumsi modernitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana generasi muda tersebut melakukan reproduksi lokalitas, terutama yang terkait dengan pengembangan pariwisata di desa asalnya. Reproduksi lokalitas ini menjadi penting karena dapat dijadikan pendorong bagi pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, meskipun generasi muda tersebut tidak bekerja secara langsung pada usaha pariwisata di desa setempat.

4. Pelecehan *Trihita Karana* (*Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*)

Sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan masyarakat serta kehadiran masyarakat dari luar Bali yang kurang memahami kebudayaan Bali pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yakni berdampak pada terjadinya pelecehan terhadap *trihita karana*, yaitu pada *parhyangan*. Pelecehan terhadap *parhyangan* ini berupa pelecehan radius kesucian pura *dang kahyangan* (Pura Luhur Petali) di desa setempat.

Kasus pembangunan "Vila Petali" yang berada di kawasan suci pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yakni menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara pihak-pihak terkait. Pada pembangunan tersebut, masyarakat setempat (penentang keberadaan "Vila Petali") bersama-sama dengan elite desa ingin mempertahankan keberadaan hutan yang berada pada kawasan suci dan disucikan oleh masyarakat sesuai ajaran *wana kerthi*. Hal ini juga diperkuat dengan *bhisama* tentang kesucian pura dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI Pusat) sesuai keputusannya Nomor 11/Kep.1/PHDIP/1994.

Masuknya kapitalisme ke pedesaan adalah sebagai akumulasi primitif (*primitive accumulation*) yang merupakan suatu kekuatan pengubah Orde [tatanan] Lama pra-kapitalis menuju pada terbentuknya Orde [tatanan] Baru yang kapitalis. Dalam masyarakat desa akumulasi primitif ini setidaknya dapat dilihat

pada dua hal. *Pertama*, adanya negaraisasi tanah dan kekayaan alam kepunyaan rakyat melalui hukum atau kekerasan, kemudian untuk lembaga-lembaga negara (birokrasi pemerintah, pengadilan, dan lain-lain) yang memberikan hak-hak baru kepada pihak pengusaha/proyek lain. *Kedua*, konsentrasi tanah dan kekayaan alam melalui proses sosial-ekonomi, baik berbentuk transaksi ekonomi jual beli maupun berbentuk ekstra ekonomi seperti gadai atau sejenisnya. Kedua bentuk akumulasi primitif ini jelas terlepas dari akses dan kontrol petani.

Secara prinsip, menurut Seda (1996: 272) ada lima prinsip kapitalisme. *Pertama*, kapitalisme adalah pengakuan penuh pada hak milik perorangan atau individu tanpa batas-batas tertentu. Hak milik pribadi adalah jaminan bagi individu yang bersangkutan untuk menegakkan kebebasan dan kemerdekaan. *Kedua*, kapitalisme merupakan pengakuan akan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. *Ketiga*, kapitalisme adalah pengakuan akan adanya dorongan atau motivasi ekonomi dalam bentuk semangat untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. *Keempat*, kapitalisme adalah pengakuan adanya kebebasan melakukan kompetisi dengan individu lain. *Kelima*, kapitalisme mengakui berlakunya hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar.

Kehadiran kapitalisme ke Desa Wisata Jatiluwih telah mengorbankan matra *parhyangan* karena dibangunnya "Vila Petali" yang mencaplok wilayah kesucian Pura Luhur Petali yang merupakan pura *dang kahyangan*. Pembangunan "Vila Petali" pada radius kesucian Pura Luhur Petali merupakan pelecehan sekaligus telah diabaikannya kekuatan spiritual yang hidup dalam masyarakat.

Sesuai *bhisama* tentang kesucian pura, telah diatur ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyengker*. Untuk pura *sadkahyangan* dipakai ukuran *apeneleng agung* (minimal lima kilo meter dari pura) dan untuk pura *dang kahyangan* dipakai ukuran *apeneleng alit* (minimal dua kilo meter dari pura). Selanjutnya, untuk pura *kahyangan tiga* dan lain-lain dipakai ukuran *apenimpug* dan *apenyengker*. Dalam kasus "Vila Petali" yang berada di sebelah utara Pura Luhur Petali sebagai pura *dang kahyangan*, vila ini sudah melanggar *bhisama* kesucian pura dan juga telah mengganggu pura tersebut karena berada pada jarak kurang dari dua kilo meter. Hal ini juga berarti

tidak sesuai dengan aturan *apeneleng alit* (minimal dua kilo meter dari pura) sesuai yang dipersyaratkan oleh *bhisama* tentang kesucian pura.

Untuk mengatur keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan, dalam kearifan lokal Bali dikenal adanya konsep *trihita karana* yang meliputi tingkat kehidupan mikro (keluarga), meso (*desa adat*), dan makro (daerah). Secara mikro (keluarga), *trihita karana* terwujud dalam (1) individu-individu anggota keluarga sebagai *pawongan*, (2) rumah dan pekarangan sebagai *pelemahan*, dan (3) *merajan* atau *sanggah* sebagai *parhyangan*. Secara meso (*desa adat*, desa, dan seterusnya) dan secara makro (daerah), *trihita karana* terwujud dalam (1) masyarakat sebagai *pawongan*, (2) lingkungan teritorial atau wilayah sebagai *palemahan*, dan (3) pura yang ada di wilayah tersebut sebagai *parhyangan*.

Selain *trihita karana*, di Bali juga dikenal kearifan lokal (*local genius*) seperti konsep *sukla* dan *leteh* atau antara suci dan tidak suci. Selanjutnya, dalam tata letak bangunan, di Bali dikenal adanya *trimandala*, dengan peruntukkan sebagai berikut: 1) tempat suci berada pada *utama mandala*, 2) perumahan atau pemukiman berada pada *madya mandala*, dan 3) tempat-tempat yang kotor, seperti: kamar mandi, kandang hewan berada pada *nista mandala*. Dalam hal ini, jika keberadaan Pura Luhur Petali dikaitkan dengan ketiga *lokal genius* di atas, maka Pura Luhur Petali merupakan *parhyangan* (dari sisi *trihita karana*), Pura Luhur Petali merupakan kawasan *sukla* (dari sisi *sukla* dan *leteh*) dan Pura Luhur Petali berada pada *utama mandala* (dari sisi *trimandala*).

Sebagai pura *dang kahyangan*, Pura Luhur Petali memiliki radius kesucian *apeneleng alit* atau dua kilo meter yang titik pusatnya adalah Pura Luhur Petali. Oleh karena di sebelah selatan pura tersebut sudah ada banyak bangunan yang merupakan pemukiman penduduk desa setempat (ada yang dibangun setelah tahun 1994 atau setelah *bhisama* kesucian pura dikeluarkan), maka terhadap bangunan di sebelah selatan pura ini diberikan kebijakan berupa pengurangan batas minimal dari dua kilo meter menjadi 500 meter dengan Pura Luhur Petali sebagai pusatnya.

Dalam RDTR tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005, khususnya pada Pasal 14, Ayat (5) butir b) menyebutkan kebijakan pengelolaan sebagai berikut.

Bangunan yang telah ada dan ternyata melanggar radius kawasan suci/tempat suci diberlakukan tiga kategori yaitu sebagai berikut:

1. bila pelanggaran yang terjadi meresahkan masyarakat dan berdampak luas/lintas kabupaten dan kota dikenakan pembongkaran;
2. bila pelanggaran meresahkan masyarakat dan berdampak lokal, dikenakan pembatasan umur bangunan maksimum lima tahun dan setelah itu dibongkar; dan
3. apabila pelanggaran berdampak kecil dikenakan pemberian status quo (bangunan boleh dimanfaatkan sampai kondisi bangunan rusak, dengan tanpa melakukan perbaikan).

Dari tiga butir kebijakan pengelolaan di atas jika dikaitkan dengan bangunan yang melanggar kesucian pura terlihat adanya unsur subjektivitas, terutama terhadap cara pandang pada dampak [akibat] yang ditimbulkan bangunan yang melanggar radius kesucian pura. Padahal seharusnya tindakan untuk melindungi kesucian pura segera diambil tanpa menunggu dampak [akibat] yang akan timbul, dalam hal ini bila perlu meskipun tanpa dampak [akibat] penegakan kesucian pura terus dilakukan. Selain itu, penggunaan kata-kata "berdampak lokal" dan "berdampak kecil" juga memiliki arti yang sangat abstrak dan subjektif. Berdampak lokal bisa diartikan sebagai lokal desa setempat, lokal Kabupaten Tabanan, atau lokal Provinsi Bali. Kemudian, berdampak kecil juga sangat abstrak untuk diartikan. Penggunaan kata-kata seperti ini, Foucault (dalam Lubis, 2006: 151) menganggap manusia lebih ditentukan oleh struktur/sistem (sosial, politik, ekonomi, dan bahasa) yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, pikiran manusia diciptakan atau dikonstruksi oleh bahasa/budaya. Lebih lanjut menurut Foucault, hal ini merupakan kematian manusia (*the death of man*).

Pihak-pihak yang mendukung keberadaan "Vila Petali" mengklaim bahwa kegiatan di vila tersebut tidak akan menimbulkan *leteh* bagi pura sekitarnya. Menurut mereka, orang-orang yang singgah ke vila tersebut adalah mereka yang sedang melaksanakan kegiatan wisata berjalan menyusuri hutan (*trekking*), dan biasanya adalah wisatawan yang berpendidikan,

mengerti alam, dan sangat menghormati budaya dan adat istiadat setempat.

Perbedaan sudut pandang antara pihak yang menolak dan mendukung keberadaan "Vila Petali" memberikan gambaran bahwa "pemaknaan agama" didekonstruksi oleh logika komodifikasi. Masyarakat desa setempat yang berpegang pada ideologi *trihita karana* pantang untuk mengkomodifikasi wilayah kesucian pura, sedangkan masyarakat yang berlogika komodifikasi menganggap wilayah kesucian pura sebagai komoditas untuk dijual ke pasar. Menurut Habermas (dalam Atmadja, I.N.B., dkk., 2008: 247-248) pendukung logika komodifikasi terjebak dalam rasionalitas instrumental yang berimplikasi pada pemaknaan zona suci pura, yakni bukan sebagai zona protektif kesakralan, melainkan sebagai instrumen untuk mendapatkan uang. Lebih lanjut, menurut Atmadja, logika komodifikasi menguasai para aktor yang terlibat dalam desakralisasi zona suci pura, dan bisa pula menjangkiti *pengempon* pura.

Dengan terjadinya kekisruhan pada penegakan tata ruang sebagai akibat dilanggarnya kawasan suci oleh pembangunan vila-vila, membuat wakil rakyat yang merupakan representasi masyarakat ikut memberikan pendapatnya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi, DPRD Bali melalui Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) pada Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Raperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah membahas masalah kawasan suci, baik berorientasi pada kondisi riil yang terjadi di lapangan maupun berdasarkan peraturan daerah (perda) yang berlaku. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dalam pandangan umumnya menyampaikan sebagai berikut.

".... Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan daerah yang sudah barang tentu mengatur dan mengikat seluruh kabupaten/kota yang ada di Bali. Karena bersifat mengikat, maka pemerintah kabupaten/kota wajib taat dan patuh terhadap perda dimaksud. Selanjutnya, dalam menetapkan perda di tingkat kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan perda yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Misalnya, perda tentang tata ruang yang mengatur kawasan suci, kondisi riil yang terjadi di lapangan kawasan suci dimaksud dilanggar oleh

kabupaten/kota.” (Majalah DPRD Bali, Triwulan II, Tahun 2008, hal. 2).

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar (F-PG) juga ikut menyuarakan tentang kawasan suci. Fraksi ini dalam pandangan umumnya menyampaikan sebagai berikut.

”... tentang kewenangan pemerintah provinsi agar dapat dijalankan secara konsisten dan tidak tumpang tindih dengan kabupaten/kota mengingat kasus-kasus yang terjadi belakangan ini tentang pemanfaatan lahan, seperti: hutan, danau, kawasan suci, dan lain-lain yang menjadi polemik belakangan ini, menurut pandangan kami adalah sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang kewenangan urusan pemerintahan sehingga investasi yang seharusnya melalui pemerintah provinsi, diambil alih oleh kabupaten/kota.” (Majalah DPRD Bali, Triwulan II, Tahun 2008, hal. 10).

Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat [Daerah] yang merupakan representasi masyarakat sudah mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar benar-benar memperhatikan implementasi dari perda tentang tata ruang serta *bhisama* kesucian pura, tetapi tuntutan tersebut tidak berarti apa-apa bagi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan betapa mekanisme demokrasi sudah berjalan, tetapi kekuatan hegemoni jauh lebih dahsyat sehingga mengalahkan segala hal yang sudah diperjuangkan oleh masyarakat. Begitu kuatnya hegemoni merasuki masyarakat yang mendukung keberadaan ”Vila Petali” sehingga mereka rela mengorbankan religiusitas yang sudah jauh tertanam di hati mereka serta di hati para *leluhur*-nya. Pengorbanan religiusitas ini merupakan suatu keterpaksaan yang dilakukan oleh masyarakat karena sudah sangat tidak berdaya menghadapi hegemoni pemerintah.

Pelanggaran terhadap isi *bhisama* kesucian pura oleh kapitalisme sebagai akibat penafsiran yang dilakukan, perlu dilakukan dekonstruksi sehingga menurut Lubis (2006: 103) akan diperoleh makna baru sesuai dengan apa yang diharapkan oleh *bhisama* tentang kesucian pura. Menurut Atmadja dkk. (2008: 249) dekonstruksi terhadap makna kawasan (zona) suci pura sudah terjadi, yakni zona suci sebagai ruang yang mematikan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal serta zona suci sebagai simbol ketidakadilan. Pemaknaan terhadap zona suci sebagai simbol ketidakadilan

terjadi karena masalah yang sama dijumpai pada pura lain, tetapi berada pada posisi pembiaran.

Munculnya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Surat Keputusan tentang Kawasan Wisata serta Penetapan Daya Tarik Wisata Bali menyiratkan telah dibukanya ruang-ruang (*space*) yang ada di Bali bagi kepentingan pariwisata. Dalam hal ini tampak bahwa semua keputusan dan perencanaan terkait dengan implementasi program-program pembangunan pada masa Orde Baru datang dari atas (*top down*), dan masyarakat di tingkat akar rumput tidak pernah diajak berbicara tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat dibuat terkejut karena secara tiba-tiba mereka harus melaksanakan program-program pembangunan, yang sebenarnya mereka sendiri tidak mengetahui pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan mengorbankan perasaan, martabat, serta harga diri, mereka terpaksa menerima pembangunan tersebut.

Dengan semakin dikenalnya Desa Wisata Jatiluwih, mengakibatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung menarik pemilik modal besar (investor) menanamkan modalnya dalam bentuk pengembangan sarana kepariwisataan di lokasi-lokasi yang strategis di desa tersebut. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005 tentang RDTR Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih, luas wilayah perencanaan mencapai 2.233 hektar. Dari luas wilayah perencanaan tersebut, khusus untuk kawasan budi daya pariwisata diarahkan pada pembangunan fasilitas daya tarik wisata berupa pondok wisata (*homestay*) maksimum tiga kamar per unit bangunan dengan fasilitas makan dan minum, tempat-tempat peninjauan/pengamatan panorama, serta fasilitas atraksi wisata seperti *trekking* dan agrowisata. Pengembangan fasilitas daya tarik wisata pada kawasan pemukiman dilakukan secara berbaur, terutama pada pengembangan pondok-pondok wisata serta fasilitas makan dan minum.

Dengan dibangunnya vila di atas tanah di tengah hutan tersebut, berarti ada perbedaan kepentingan dalam penggunaan tanah. Berkaitan dengan hal ini, Aditjondro (1995) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan dalam penggunaan tanah potensial menimbulkan konflik tanah. Konflik tanah mencakup

konflik-konflik internal yang terdiri atas konflik kelas, konflik adat, dan konflik gender. Selanjutnya, konflik eksternal, yakni terdiri atas konflik antara negara dengan warga negara, konflik antarsistem ekonomi, konflik antarekosistem, konflik mayoritas dan minoritas, dan konflik ekologi politik khas Asia Tenggara (Metera, 1996). Dalam kasus "Vila Petali", karena tanah yang dibangun tersebut berada pada radius kesucian pura, maka fenomena konflik yang muncul adalah antara warga negara (masyarakat) dengan negara (pemerintah), di samping juga konflik ekologi terkait dengan ketersediaan air bagi kesinambungan kegiatan pertanian.

Jika konflik tersebut dikaitkan dengan ideologi *trihita karana* yang menekankan pada keharmonisan hubungan pada aras *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, maka konflik tersebut menurut Atmadja dkk. (2008: 256) karena adanya perbedaan anutan ideologi, kelompok pro-*vila* mendukung neoliberalisme, sedangkan kelompok pro-*bhisama* mendukung ideologi *trihita karana*. Lebih lanjut Atmadja dkk. (2008: 245) menyatakan bahwa roh neoliberalisme adalah keserakahan.

Kehadiran "Vila Petali" dan juga penjaga vila lengkap dengan aktivitas kesehariannya, berpengaruh terhadap lingkungan (*palemahan*), terutama terhadap ketersediaan air. Ketersediaan air di desa ini dapat terancam karena aktivitas kehidupan sehari-hari di vila tersebut (seperti membersihkan vila, mandi, memasak, mencuci, termasuk menyiram tanaman hias yang ditanam di sekitar vila) mempergunakan air tanah yang ada di tengah hutan. Keterancaman terhadap air tidak saja terhadap kehidupan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, tetapi juga terhadap aktivitas pertanian. Masyarakat tidak banyak yang mempermasalahkan tentang air pada pembangunan vila tersebut. Mereka sebenarnya memahami akan pentingnya air, baik untuk kehidupan mereka maupun untuk kepentingan sawah-sawah pertanian. Mereka lebih banyak memperbincangkan tentang kawasan suci pura, dengan harapan apabila masalah vila tersebut terselesaikan, maka secara otomatis permasalahan air juga akan terselesaikan.

Pembangunan di tengah hutan, di samping merusak flora, fauna, serta sumber daya lainnya yang ada di hutan juga akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan hutan untuk menyimpan air hujan

sebagai air tanah. Dalam hal ini ditambah lagi dengan pengambilan air tanah di tengah hutan, maka semakin mengurangi ketersediaan air tanah di hutan. Sebagaimana tampak di sini, orientasi pembangunan di tengah hutan (Vila Petali) lebih banyak bermotif ekonomi daripada mempertimbangkan aspek ekologi atau aspek *palemahan*. Menurut Susilo (2003: 2) pembangunan yang berorientasi ekonomi kerap akan menciptakan dekomposisi ekologi. Dekomposisi ekologi adalah suatu keadaan tidak adanya komposisi yang ideal dalam suatu sistem ekologi tertentu akibat intervensi manusia yang berlebihan untuk tujuan yang dimilikinya terhadap sistem ekologi tersebut.

Dalam pembangunan "Vila Petali", dekomposisi ekologi berupa berkurangnya ketersediaan air bagi masyarakat, khususnya terkait dengan kebutuhan air oleh petani dalam pengerjaan sawah. Akibatnya, setelah panen padi, petani desa setempat saling "adu cepat" untuk memulai mengolah tanah sawah karena berebut air. Hal ini menyebabkan [sebagian] petani yang seharusnya tidak membakar jerami sebelum mengolah tanah sawah, kemudian menjadi membakar jerami karena takut kehabisan air. Oleh karena air dan sawah di Bali selalu berhubungan dengan organisasi tradisional *subak*, maka *subak* pun mendapat ancaman.

Subak adalah sistem pengelolaan air yang dilakukan oleh petani di Bali berdasarkan filosofi *trihita karana*. Ekosistem *subak* adalah semua elemen yang terdapat dalam pengelolaan *subak* dan setiap elemen merupakan mata rantai jaring kehidupan dari *subak* serta setiap elemen saling memberikan pengaruh pada kehidupannya. Elemen-elemen yang terdapat dalam ekosistem *subak* meliputi petani, lahan sawah, sumber air, jaringan irigasi, peralatan untuk pengolahan tanah, ternak, unsur *parhyangan*, semua unsur *palemahan*, dan unsur *pawongan*, termasuk *awig-awig*.

Kenyataan yang terjadi sekarang, memang *subak* masih eksis. Namun, dari beberapa anggota masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani mengaku ketersediaan air untuk mengairi sawah sudah semakin berkurang, terutama setelah selesai panen padi bali. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perebutan air di antara petani yang berpotensi menimbulkan konflik di antara petani. Di samping itu, oleh pihak-pihak yang berkepentingan

dapat dijadikan alasan untuk melanggengkan hegemoni pengalihan sawah menjadi tempat untuk membangun sarana yang diperlukan oleh pengembangan pariwisata.

Masalah ekologi sebagai implementasi dari matra *pawongan* dan matra *palemahan* tidak saja muncul pada pemerintahan Orde Baru, tetapi juga muncul kembali di Orde Reformasi, yakni dengan kondisi yang lebih parah sebagai akibat pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sebagai akibat keinginan untuk memperbesar pendapatan asli daerah (PAD). Fenomena ini menurut Bagus (2004: 285) merupakan tantangan berat dalam pemerintahan Orde Reformasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengusung desentralisasi lewat otonomi daerahnya. Otonomi daerah sesungguhnya mengandung suatu itikad baik, yakni keinginan untuk mewujudkan kemandirian yang bertanggung jawab dan kemerdekaan pembangunan yang benar-benar "dari bawah", tetapi dalam pelaksanaannya, yakni karena kewenangan pemerintah terletak di aras kabupaten/kota dan bukan di provinsi, tidak terhindarkan kemunculan sejumlah dampak negatifnya.

Pembangunan "Vila Petali" lebih mementingkan libido kapitalis untuk memiliki vila di kawasan suci sekaligus untuk mempertontonkan identitas sosial atau kelas sebagai orang kaya baru (OKB). Dengan pembangunan vila tersebut, masyarakat Desa Wisata Jatiluwih akan terjebak pada satu ironi. Di satu sisi mereka tetap ingin berpegang pada ideologi *trihita karana*, sedangkan di sisi lain (Atmadja dkk., 2008: 261) mereka terlibat pada sekularisasi spiritual dan libidinalisasi spiritualitas, disebut sebagai *hibrid-spiritualitas*.

Menurut Piliang (2005: 175), wacana *hibrid-spiritualitas* adalah sebuah wacana yang di dalamnya spiritualitas melakukan proses kawin silang (*hybridity*) dengan wacana keduniaan di dalam ruang kontradiksi. *Hibrid-spiritualitas* adalah kawin silang dua kekuatan bertentangan atau lebih menjadi satu kekuatan kontradiktif, yaitu ketuhanan/konsumerisme, transenden/imanen, dan kesucian/kedangkalan. *Hibrid-spiritualitas* adalah ruang hasrat yang di dalamnya mesin-mesin kecepatan (*domology*) melakukan simbiosis dengan mesin kekhususan.

Selanjutnya, makna yang timbul adalah makna kesejahteraan, makna pelestarian, dan makna pemberdayaan.

1. Makna kesejahteraan

Merupakan manifestasi dari konsep kesejahteraan menurut agama Hindu, yaitu *moksartham jagadhita*. Konsep ini dibingkai oleh *caturpurusa artha* (*dharma, artha, kama, dan moksa*) serta upacara *pancayadnya* untuk keharmonisan implementasi *trihita karana* bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat. Dalam hal ini dengan mengedepankan makna keharmonisan *trihita karana*, upacara-upacara keagamaan tidak dikemas sebagai daya tarik wisata, dengan tetap mempergunakan simbol yang ekspresif, mengungkapkan makna yang multidimensional sesuai tempat, waktu, dan kondisi masyarakat setempat. Kesejahteraan sebagai akibat pengembangan pariwisata oleh sebagian besar masyarakat Desa Wisata Jatiluwih dipandang sebagai dialektika sejahtera yang belum sejahtera.

2. Makna pelestarian

Merupakan makna disharmonisasi pada budaya dan ekologi karena alih fungsi tanah hutan untuk kebutuhan akomodasi yang berada pada radius kesucian pura. Selanjutnya, untuk mencapai keberlanjutan budaya, sosial, dan ekologi, keberagaman perlu dipertimbangkan dalam keterlibatan masyarakat pada pengembangan pariwisata di desa wisata.

3. Makna pemberdayaan

Dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di desa wisata sudah mengungkapkan kesadaran kolektif, pendekatan dialogis, keterbukaan, saling mengasahi, dan saling menolong untuk melahirkan rasa kebersamaan, kolektivitas, serta solidaritas. Namun, aspek yang terkait pemberdayaan di atas hanya terjadi pada segelintir masyarakat setempat, sehingga ideologi pengembangan pariwisata yaitu kesejahteraan masyarakat setempat belum sepenuhnya terjadi.

SIMPULAN

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih menimbulkan komodifikasi dan konflik kepentingan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih berupa partisipasi pada tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasional, tahap pengembangan, dan tahap pengawasan.

Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih berdampak terhadap pengelolaan desa wisata, pengambilan gambar oleh wisatawan, penyerapan pekerja dari masyarakat setempat, dan pelecehan *trihita karana* (*parhyangan, pawongan, dan palemahan*).

Makna yang timbul dari pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih adalah makna kesejahteraan, makna pelestarian, dan makna pemberdayaan.

Beberapa hal yang direkomendasikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut.

Dengan semakin membaiknya hubungan di antara pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah-pengusaha pariwisata), semua pihak hendaknya dapat menjaga keselarasan hubungan antara ketiga pemangku kepentingan tersebut terkait dengan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Pada pengembangan produk apa pun di bidang pariwisata, terlebih-lebih yang mempergunakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*), dengan cara apapun masyarakat setempat (tempat produk pariwisata dikembangkan) harus dilibatkan.

Masyarakat setempat perlu lebih diberdayakan, yakni dengan bentuk-bentuk pemberdayaan seperti pola swadaya, pola kemitraan, dan pola pendampingan.

Pemerintah perlu melakukan tindakan nyata dan positif yang langsung menyentuh masyarakat, yakni untuk memperbaiki trauma hubungan antara masyarakat dengan pemerintah pada masa Orde Baru.

Untuk mencapai lebih baik, dalam konteks Bali, perlu berpegang pada pengetahuan lokal yang mengglobal serta keselarasan *trihita karana*.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aditjondro, George Junus. (1995). *Bali, Jakarta's Colony: Social and Ecological Impact of Jakarta-based Conglomerates in Bali's Tourism Industry*. Working Papers Number 58, Asia Research Centre, Murdoch University, Perth.
- Atmadja, I N.B., A.T. Atmadja. (2008). Ideologi Tri Hita Karana -Neoliberalisme=Vilanisasi Radius Suci Pura. Dalam I Wayan Ardika (Eds.); *Dinamika Sosial Masyarakat Bali dalam Lintasan Sejarah*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Ardika, I Wayan. (2003). *Pariwisata Budaya Berkelanjutan Repleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global*. Denpasar: Program Studi S2 Kajian Pariwisata Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Bappeda Bali. (2008). *Kajian Sistem Pungutan Retribusi Objek Wisata Satu Pintu Masuk Bali*. (Laporan Final). Denpasar: Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- Bagus, I.G.N. dkk. (2002a). *Pemikiran Baru untuk Pembangunan Bali yang Berkelanjutan dan Perspektif Budaya*, Laporan Penelitian, Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana Denpasar, Denpasar.
- Bagus, I.G.N. dkk. (2002b). *Masalah Budaya dan Pariwisata dalam Pembangunan*, Laporan Penelitian, Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana Denpasar, Denpasar.
- Bagus, I.G.N. dkk. (2002c). *Menuju Terwujudnya Ilmu Pariwisata dalam Pembangunan*. Denpasar, Laporan Penelitian, Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana Denpasar, Denpasar.
- Bagus, I.G.N. 2004. *Mengkritisi Peradaban Hegemonik*. Denpasar: Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Barker, Chris. (2004). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang.
- Foucault, Michael. 2003. *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Foucault 1954–1984*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Giddens, Anthony. (2003). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, UI Press, Jakarta.
- Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/KEP./I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Setelah Kebenaran dan Kepastian Dihancurkan Masih Adakah Tempat Berpijak bagi Ilmuwan: Sebuah Uraian Filsafat Ilmu Pengetahuan Kaum Postmodernisme*. Bogor: Akademia.
- Majalah DPRD Bali, Nomor 2 Triwulan II, 2008, hal. 1 – 12.
- Metera, I Gde Made. 1996. *Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Fasilitas Pariwisata dan Dampaknya bagi Petani: Kasus Desa Beraban Tabanan Bali*. Singaraja: Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti.
- Mowforth, Martin, dan Ian Munt. (1998). *Tourism and Sustainability New Tourism in the Third World*, Routledge, London and New York.
- Natori, Masahiko. (2001). *A Guide Book for Tourism-Based Community Development*. Asia Pacific Tourism Exchange Center, Yokohama.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*, Jalasutra, . Yogyakarta.
- Piliang, Yasraf Amir. 2005. *Cultur Studies dan Postmodernisme: Isyu, Teori, dan Metode*. Makalah pada Seminar Cultural Studies: Isu, Teori dan Metode yang diselenggarakan oleh Program S2 dan S3 Kajian Budaya Universitas Udayana. Denpasar 12 Juli 2005.
- Pitana, I Gde. 1999. *Pelangi Pariwisata Bali*. Denpasar: PT Bali Post.
- Pitana, I Gde. (2003). Potensi Konflik, Adat Budaya, dan Pariwisata Bali. Dalam: I Gde Janamijaya, I Nyoman Wiratmaja, dan I Wayan Gde Suacana (Editor). *Eksistensi Desa Pakraman di Bali*. Denpasar: Yayasan Tri Hita Karana.
- Pujaastawa, I.B.G. dkk. 2005. *Pariwisata Terpadu Alternatif Model Pengembangan Pariwisata Bali Tengah*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Ratcharak, Nattamon. 2007. "Guidelines of Community Participation for Sustainable Tourism Development: The Case Study of Tambon Chergntalay, Amphur Thalang, Changwat Phuket" (thesis). Phuket: Prince of Songkla University.
- Seda, Frans. 1996. *Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susilo, Y. Eko Budi. 2003. *Menuju Keselarasan Lingkungan: Memahami Sikap Teologis Manusia terhadap Pencemaran Lingkungan*. Malang: Arreroes Press.
- Turner, B.S. (1992). *Max Weber: From History to Modernity*. London: Routledge.